



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA **Tahun 2025**





KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan Rahmat-Nya, Kami dapat menyelesaikan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun berjalan tahun 2025, capaian renstra, pelayanan DPMTSP, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tujuan dan sasaran serta program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur.

Kami telah mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan rancangan akhir perubahan rencana kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 dengan baik, namun karena keterbatasan banyak hal, maka kami menyadari bahwa rencana kerja perubahan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari semua pihak akan diterima dengan senang hati untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan datang. Semoga rencana kerja perubahan ini bermanfaat dan menjadi bagian dari keinginan bersama untuk perbaikan berkelanjutan bagi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur dan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Manggar, 24 Juni 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitung Timur



HARLI AGUSTA, ST
NIP 19750821 200212 1 005



DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

BAB I	PENDAHULUAN	I-1
1.1.	Latar Belakang	I-1
1.2.	Landasan Hukum	I-2
1.3.	Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja	I-5
1.4.	Sistematika Penulisan	I-5
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025.....	II-1
2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	II-1
2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-11
2.3.	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	II-14
2.4.	Review Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2025	II-14
2.5.	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-21
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	III-1
BAB IV	PENUTUP	IV-1



DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Renja Triwulan I Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur.....	II-2
TABEL 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur.....	II-12
TABEL 2.3	Review Terhadap Rencana Kerja RKPD Perubahan Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur.....	II-15
TABEL 3.1	Rekapitulasi Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur.....	III-3
TABEL 3.2	Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target Dan Pagu Pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur.....	III-4



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mencapai tujuan jangka menengah Perangkat Daerah dan memenuhi amanat Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP), serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD).

Penyusunan perubahan Rencana Kerja Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025 ini dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Belitong Timur sampai dengan triwulan I yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan pada tahun 2025. Dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) DPMPTSP Kabupaten Belitong Timur akan menjadi dokumen perencanaan pada masa transisi antara RPJPD Tahun 2005-2025 dengan RPJMD Tahun 2021-2026, sekaligus penjabaran tahap pertama pembangunan 5 tahunan, an sudah mengacu pada RPJMD dan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025-2029 dan berpedoman pada Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Belitong Timur Tahun 2014-2034, dan memperhatikan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025. Penentuan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 disusun sejalan dengan prioritas pembangunan Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan menjadi landasan daerah untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi

Penyusunan P-Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur sebagai Instansi Daerah yang menangani Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar berupa urusan Penanaman Modal berpedoman kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Lampiran VI)



tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) kemudian menyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA-P) dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun Anggaran 2024.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan renja perubahan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitong Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Kerja Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 15. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



17. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 19);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 10)
25. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 20), dan;
26. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 18).



1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud

Dokumen Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Belitong Timur disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang memberikan perubahan arah pembangunan tahunan sebagai akibat adanya beberapa perubahan pada proses perencanaan yang sudah ditetapkan.

2. Tujuan

Dokumen Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Belitong Timur disusun bertujuan untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Belitong Timur.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) sampai dengan triwulan I tahun 2025 merupakan evaluasi pelaksanaan dari renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur. Evaluasi ini ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025. Hasil evaluasi Renja ini juga akan menjadi salah satu input bagi penyusunan Perubahan Rencana Kerja tahun 2025.

Data capaian pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur diambil berdasarkan data capaian pelaksanaan sampai dengan triwulan I Tahun 2025 seperti yang tergambar pada Tabel 2.1 memperlihatkan capaian rata-rata kinerja fisik sebesar 36,32 % dan capaian realisasi keuangan sebesar 16,01% dari keseluruhan pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar urusan penanaman modal yang dijabarkan melalui 5 Program dan 10 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan, dengan jumlah anggaran Belanja seluruhnya sebesar Rp 5.839.475.752,- dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan Satu sebesar Rp 935.034.161,-.

Masih rendahnya capaian kinerja dan realisasi keuangan disebabkan oleh pelaksanaan sebagian besar kegiatan yang baru dimulai pada Triwulan Kedua. Hal ini terjadi karena pada awal Triwulan Pertama dilakukan penyesuaian anggaran (refocusing), sehingga sebagian besar subkegiatan mengalami penundaan atau perubahan rencana pelaksanaan.

Berikut hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan pencapaian renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur pada masa berjalan tahun 2025 sampai dengan triwulan Satu tahun 2025.



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Renja Triwulan I Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=9/7x100%		11 = 6 + 9		12=11/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Semua Bidang																	
	Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)	82,00	-	91,97	-	79	5.694.678.052		932.669.161	80	932.669.161	101,84%	16,38%	76,00	932.669.161		0,00%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar (Persen)		-	0,00	-	100	4.301.053.152	100	713.136.728	100	713.136.728	100,00%	16,58%	0,00	713.136.728	0,00%	0,00%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		-	0,00	-	50	4.301.053.152	22	713.136.728	22	713.136.728	44,00%	16,58%	22,00	713.136.728	0,00%	0,00%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)		-	0,00	-	87,5	341.215.000	53	8.809.719	53	8.809.719	60,95%	2,58%	0,00	8.809.719	0,00%	0,00%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	4	15.338.800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%



No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)	
										I									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=9/7x100%		11 = 6 + 9		12=11/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	12	75.453.700	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	9	29.808.400	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	10	29.476.600	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	9	36.162.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)		-	0,00	-	4	4.975.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		-	0,00	-	55	150.000.000	3	8.809.719	3	8.809.719	5,45%	5,87%	3,00	8.809.719	0,00%	0,00%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)		-	0,00	-	65	132.021.900	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%



No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)		
									I										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=9/7x100%		11 = 6 + 9		12=11/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		-	0,00	-	48	132.021.900	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor (Persen)		-	0,00	-	91	732.710.000	100	198.567.414	100	198.567.414	109,89%	27,10%	0,00	198.567.414	0,00%	0,00%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	12	176.420.000	3	26.202.414	3	26.202.414	25,00%	14,85%	3,00	26.202.414	0,00%	0,00%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	12	556.290.000	3	172.365.000	3	172.365.000	25,00%	30,98%	3,00	172.365.000	0,00%	0,00%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik (Persen)	92,75	-	0,00	-	95	187.678.000	97	12.155.300	97	12.155.300	102,36%	6,48%	0,00	12.155.300	0,00%	0,00%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan		-	0,00	-	11	112.410.000	3	11.305.300	3	11.305.300	27,27%	10,06%	3,00	11.305.300	0,00%	0,00%



No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)	
										I									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=9/7x100%		11 = 6 + 9		12=11/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Perizinannya (Unit)																
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		-	0,00	-	3	52.088.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		-	0,00	-	34	23.180.000	2	850.000	2	850.000	5,88%	3,67%	2,00	850.000	0,00%	0,00%
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				37,15%	16,38%				
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																			
Meningkatnya Investasi		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan kebijakan daerah terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan (Persen)	100,00	-	80,00	-	100	19.841.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	66,67	-		0,00%



PERUBAHAN
RENCANA KERJA
2025

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah



No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)	
										1									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=9/7x100%		11 = 6 + 9		12=11/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	cakupan sektor usaha yang dipromosikan (sektor)		-	0,00	-	4	41.125.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)		-	0,00	-	1	41.125.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	0,00%				
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu (Persen)	86,00	-	96,57	-	94,7	44.852.700		2.365.000	-	2.365.000	0,00%	5,27%	94,70	2.365.000		0,00%
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan (persen)		-	0,00	-	11	44.852.700	-	2.365.000	-	2.365.000	0,00%	5,27%	0,00	2.365.000	0,00%	0,00%



No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)		
									I										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=9/7x100%		11 = 6 + 9		12=11/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	*Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)		-	0,00	-	1000	26.615.200	112	1.440.000	112	1.440.000	11,20%	5,41%	112,00	1.440.000	0,00%	0,00%
		Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	*Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)		-	0,00	-	60	18.237.500	6	925.000	6	925.000	10,00%	5,07%	6,00	925.000	0,00%	0,00%
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				10,71%	5,27%				
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	Meningkatnya Investasi	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya (Investor)	22,00	-	94,00	-	62	38.979.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	62,00	-		0,00%



PERUBAHAN
RENCANA KERJA
2025

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah



No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)	
										I				10=9/7x100%					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=9/7x100%		11 = 6 + 9		12=11/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
								5.839.475.752		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		935.034.161		36,32%	16,01%				
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM				Sangat Rendah	Sangat Rendah				



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur yang mengampu urusan Penanaman modal diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan dan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD. Penetapan Indikator ini memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing pada urusan masing-masing Perangkat Daerah. Akumulasi pencapaian indikator program dan kegiatan setiap tahun merupakan kondisi kinerja yang ingin dicapai pada akhir periode Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat dalam tabel 2.2



Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitung Timur

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
	Indikator Renstra Perubahan 2021-2026													
1	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik			53	54	60	67	73	73,83	78,73	94,35	94,71		Realisasi tahun 2025 belum tersedia karena data bersifat tahunan
1,1	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang			65-76,60 = C	65-76,60 = C	65-76,60 = C	65-76,60 = C	65-76,60 = C	74,75 = C	85,33 = B	86,78 = B	86,06	A ≥ 88,31- 100	
1,2	Nilai AKIP Perangkat Daerah			B > 60-70	B > 60-70	B > 60-70	B > 60-70	BB > 70-80	63,08 = B	71,72 BB	72,51 = BB	76,40	BB > 70 – 80	
1,3	Rata - Rata Tingkat Kepatuhan Pelayanan			Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang (79,99)	81,5 (kualitas tinggi)	94,53 (kualitas Tertinggi)	Kualitas tertinggi (90,60)	Tertinggi (A)	
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			2,6	2,7	2,8	2,9	3	2,15	2,7	3,56	4,16		
2,1	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi			63 persen	65,00 persen	67,00 persen	69,00 persen	72,00 persen	83,33persen	100 persen	100 persen	100 Persen	100 persen	
3	Nilai Investasi Tahunan Berskala Nasional (PMA/PMDN)			359,057 juta rupiah	378771 juta rupiah	390513 juta rupiah	472,466 juta rupiah	402,814 juta rupiah	472,466 juta rupiah	1.373,500 juta rupiah	616.140 juta rupiah	1.068.107 juta rupiah		
3,1	Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM			11,16 persen	11,20 persen	11,40 persen	11,60 persen	11,80 persen	64,84 persen	22,67 persen	32,80 persen	37,45 Persen	32,8 persen	



No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
	Indikator Rancangan Renstra 2025-2029													
1	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP Daerah (Nilai)			-	-	-	-	70,01	Na	Na	Na	66,37	70,01	Realisasi tahun 2025 belum tersedia karena data bersifat tahunan
1,1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)			-	-	-	-	76,6	Na	Na	Na	76,4	76,6	
1,2	Indeks Profesionalisme ASN (Nilai)			-	-	-	-	75	Na	Na	Na	Na	75	
2	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota (persen)			-	-	-	-	4	Na	Na	Na	73,53	4	
2,1	Cakupan realisasi investasi terhadap target rencana investasi (Persen)			-	-	-	-	25	Na	Na	Na	Na	25	



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur menghadapi berbagai permasalahan dan isu strategis. Secara umum, isu strategis dalam urusan penanaman modal adalah peningkatan pertumbuhan realisasi investasi, yang terurai ke dalam permasalahan sebagai berikut:

- a. Masih terbatasnya realisasi investasi akibat belum optimalnya iklim dan pelayanan investasi di daerah
- b. Belum maksimalnya dukungan infrastruktur dan regulasi yang mendukung percepatan realisasi investasi
- c. Kurangnya informasi potensi investasi yang lebih terperinci dan terkini
- d. Masih banyak masyarakat yang belum paham proses perizinan secara online
- e. Rendahnya kesadaran penanam modal dalam melaporkan nilai real (sebenarnya) realisasi investasi mereka.
- f. Layanan yang tersedia pada Mal Pelayanan Publik (MPP) di Belitong Timur belum optimal.

Untuk menjawab hal tersebut didalam perubahan rencana kerja tahun 2025 ini dilakukan berbagai penyesuaian diantaranya penyesuaian kebutuhan anggaran dan target dari program/ kegiatan dan sub kegiatan.

2.4 Review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2025

Dari perubahan Renja yang telah disusun oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja yang merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang ada pada dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur, dengan memperhatikan rencana strategis kementerian terkait dan kesesuaian dengan RPJMD Kabupaten Belitong Timur yang diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan.

Dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja memuat informasi tentang rumusan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap perubahan RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolak ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan identifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD, beserta pendanaan indikatif.

Perbedaan antara Rencana Kerja awal dengan hasil analisis kebutuhan sebagian besar disebabkan :

1. Penyesuaian beberapa target indikator sub kegiatan dikarenakan ada penyesuaian anggaran (refocusing) yang dilakukan pada triwulan I tahun 2025.
2. Perubahan pagu indikatif yang disesuaikan dengan rencana target indikator dan kebutuhan yang akan dicapai pada tahun 2025;

Secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.3 Review terhadap Rencana Kerja RKPD Perubahan Tahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur.



Tabel 2.3
Review Terhadap Rencana Kerja RKPD Perubahan Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitong Timur

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target	Pagu (Rp)	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6
URUSAN PENUNJANG				5.694.678.050	URUSAN PENUNJANG				5.694.678.050	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cekupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	79 persen	5.694.678.050	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cekupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	79 persen	5.694.678.050	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar	100 persen	-	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar	100 persen	-	
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	-	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	-	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar	100 persen	4.214.503.150	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar	100 persen	4.214.503.150	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	OPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 orang/bulan	4.214.503.150	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	OPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 orang/bulan	4.214.503.150	
Kegiatan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah		Persentase aparatur yang berkinerja baik	81 persen	-	Kegiatan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah		Persentase aparatur yang berkinerja baik	81 persen	-	
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Luar Daerah dan Kab. Belitong	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	-	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Luar Daerah dan Kab. Belitong	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	-	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan sarana pendukung kinerja perangkat daerah	87,5 persen	341.215.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan sarana pendukung kinerja perangkat daerah	87,5 persen	341.215.000	



RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target	Pagu (Rp)	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	OPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	15.338.800	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	OPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	15.338.800	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	OPD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	75.453.700	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	OPD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	75.453.700	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	OPD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 paket	29.808.400	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	OPD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 paket	29.808.400	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	OPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	29.476.600	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	OPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	29.476.600	
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	OPD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 paket	36.162.500	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	OPD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 paket	36.162.500	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	OPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 dokumen	-	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	OPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 dokumen	-	
Sub Kegiatan Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	OPD	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 laporan	4.975.000	Sub Kegiatan Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	OPD	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 laporan	4.975.000	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 laporan	150.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 laporan	150.000.000	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah	65 persen	132.021.900	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah	65 persen	132.021.900	
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	OPD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	49 unit	132.021.900	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	OPD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	49 unit	132.021.900	



**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR**

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA
2025**

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target	Pagu (Rp)	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang kantor	91 persen	819.260.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang kantor	91 persen	819.260.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 laporan	-	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 laporan	-	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	176.420.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	176.420.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	642.840.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	642.840.000	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	95 persen	187.678.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	95 persen	187.678.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Beltim	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit	112.410.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Beltim	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit	112.410.000	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Beltim	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	52.088.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Beltim	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	52.088.000	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Beltim	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 unit	23.180.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Beltim	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 unit	23.180.000	
PENANAMAN MODAL				144.797.700	PENANAMAN MODAL				144.797.700	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Cakupan kebijakan daerah terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan	100 persen	19.841.000	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Cakupan kebijakan daerah terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan	100 persen	19.841.000	



RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target	Pagu (Rp)	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Kebijakan daerah tentang kemudahan berusaha dibidang penanaman modal yang telah disusun berdasarkan ketentuan	1 kebijakan	7.225.000	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Kebijakan daerah tentang kemudahan berusaha dibidang penanaman modal yang telah disusun berdasarkan ketentuan	1 kebijakan	7.225.000	
Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di Daerah	2 dokumen	7.225.000	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di Daerah	2 dokumen	7.225.000	
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Persentase informasi investasi yang tersedia	100 persen	12.616.000	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Persentase informasi investasi yang tersedia	100 persen	12.616.000	
Pemutakhiran data Potensi Investasi Daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Kab. Belitim	Jumlah Daerah yang telah Dilaksanakan Pemutakhiran data Potensi Investasi	1 Daerah	12.616.000	Pemutakhiran data Potensi Investasi Daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Kab. Belitim	Jumlah Daerah yang telah Dilaksanakan Pemutakhiran data Potensi Investasi	1 Daerah	12.616.000	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Investor baru yang berinvestasi	55 Investor	41.125.000	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Investor baru yang berinvestasi	55 Investor	41.125.000	
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan sektor usaha yang dipromosikan	4 sektor	41.125.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan sektor usaha yang dipromosikan	4 sektor	41.125.000	
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Belitim	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 dokumen	41.125.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Belitim	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 dokumen	41.125.000	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu	94,7 persen	44.852.700	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu	94,7 persen	44.852.700	



**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR**

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA
2025**

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target	Pagu (Rp)	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan	11 persen	44.852.700	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan	11 persen	44.852.700	
Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Belitim	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 pelaku usaha	26.615.200	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Belitim	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 pelaku usaha	26.615.200	
Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	60 Kegiatan Usaha	18.237.500	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	60 Kegiatan Usaha	18.237.500	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya	62 investor	38.979.000	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya	62 investor	38.979.000	
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kepatuhan investor terhadap kewajiban penyampaian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	8,5 persen	38.979.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kepatuhan investor terhadap kewajiban penyampaian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	8,5 persen	38.979.000	
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Kab. Belitim	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	30 kegiatan usaha	7.104.000	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Kab. Belitim	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	30 kegiatan usaha	7.104.000	



RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target	Pagu (Rp)	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6
Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Belitim	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisis dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan, serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	30 kegiatan usaha	31.875.000	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Belitim	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisis dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan, serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	30 kegiatan usaha	31.875.000	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal dikelola berdasarkan sektor usaha	81,82 persen	-	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal dikelola berdasarkan sektor usaha	81,82 persen	-	
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan	91 persen	-	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan	91 persen	-	
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Belitim	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	0 dokumen	-	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Belitim	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	0 dokumen	-	
JUMLAH				5.839.475.750	JUMLAH				5.839.475.750	



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang berasal dari pemangku kepentingan untuk urusan Penanaman modal pada tahun 2025 tidak ada,



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Belitung Timur telah terangkum dalam dokumen Perubahan Renja DPMPTSP Tahun 2025. Dokumen ini merupakan dokumen transisi antara RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021–2026 dan Renstra DPMPTSP Tahun 2021–2026, serta telah mengacu pada RPJMD Kabupaten Belitung Timur dan Renstra DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur periode 2025–2029.

Program, kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur dalam Renstra DPMPTSP tahun 2025–2029. Berikut Tujuan dan Sasaran yang ada dalam dokumen perencanaan DPMPTSP yang telah disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih periode 2025–2029, yaitu:

Visi dan Misi Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029

Visi : **“BELITUNG TIMUR NYAMAN DAN BERKEMAJUAN”.**

Misi :

1. Mewujudkan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Digital dan kepemimpinan Kolaboratif
2. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas Produktif, Berakhlak, Berbudaya, dan Bahagia
3. Mempercepat Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis UMKM, Pertanian, Perkebunan, Pariwisata, Perikanan, Kelautan, dan Ekonomi Kreatif, Serta Memperkuat Kolaborasi Antar Pelaku Pembangunan.
4. Meningkatkan dan Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Publik Yang Berkualitas dan Memadai Untuk Pemerataan Kesejahteraan
5. Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Bijaksana, Berwawasan Lingkungan, dan Berkelanjutan

Untuk mendukung Visi Kabupaten Belitung Timur, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur berperan **Misi 3** : Mempercepat Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis UMKM, Pertanian, Perkebunan, Pariwisata, Perikanan, Kelautan, dan Ekonomi Kreatif, Serta Memperkuat Kolaborasi Antar Pelaku Pembangunan.



Berikut tujuan dan sasaran dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur untuk mendukung Misi 1 dan Misi 3 tersebut :

Tujuan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur dirumuskan: "Meningkatnya Pertumbuhan investasi dan Akuntabilitas Perangkat Daerah"

Sasaran :

1. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur merupakan jalan untuk terwujudnya visi dan misi dari Kepala Daerah yang sudah menjadi visi dan misi Kabupaten Belitong Timur . Pada tahun 2025 Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur sebesar Rp 8.164.220.000,- terdiri dari urusan penunjang sebesar Rp 6.706.375.000,- dan Urusan Penanaman Modal sebesar Rp 1.457.845.000,- namun dalam Perubahan Renja tahun 2025 ini ada pengurangan menjadi sebesar Rp 5.839.475.750,- terdiri dari urusan penunjang sebesar Rp 5.694.678.050,- dan urusan Penanaman modal sebesar Rp 144.797.700,- Perubahan pagu ini dikarenakan berbagai macam alasan diantaranya:

1. Adanya penyesuaian target dikarenakan adanya penyesuaian (refocusing) yang dilakukan di awal tahun 2025 dan perubahan pelaksanaan rencana kegiatan
2. Adanya penyesuaian anggaran, dengan kebutuhan dan target indikator yang akan dicapai.

Berikut Rekapitulasi Perubahan Pagu Indikatif tahun 2025 dan Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target Dan Pagu Pada Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025.



Tabel 3.1
Rekapitulasi Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur

No	Urusan	Renja Murni Tahun 2025				Renja Perubahan Tahun 2025			
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
1	Penanaman Modal	4	6	9	1.457.845.000	4	5	7	144.797.700
2	Urusan Penunjang	1	7	16	6.706.375.000	1	5	14	5.694.678.050
	JUMLAH	5	13	25	8.164.220.000	5	10	21	5.839.475.750



Tabel 3.2
Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target Dan Pagu Pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitong Timur

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja 2025			Pagu			Lokasi	Sumber Dana	Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju 2026		
							APBD 2025	Renja 2025	Renja Perubahan 2025	APBD 2025	Renja 2025	Renja Perubahan 2025				Kinerja	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
					URUSAN PENUNJANG					6.359.300.052	6.706.375.000	5.694.678.050					11.010.738.000	
2	1	8	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	79 persen	79 persen	79 persen	6.359.300.052	6.706.375.000	5.694.678.050				92 persen	11.010.738.000	
2	1	8	1	2,01	Kegiatan Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar	10 0 persen	100 persen	100 persen	6.500.600	6.500.600	-				10 0 persen	25.000.000	
2	1	8	1	2,01	1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	0 Dokumen	6.500.600	6.500.600	-	OPD	Dana Transfer Umum;DA U	Pegawai dan Masyarakat yang menerima layanan	0 Dokumen	25.000.000
2	1	8	1	2,02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar	10 0 persen	100 persen	100 persen	4.301.053.152	4.896.178.900	4.214.503.150				10 0 persen	8.608.238.000
2	1	8	1	2,02	1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang	50 Orang	42 Orang	4.301.053.152	4.896.178.900	4.214.503.150	OPD	Dana Transfer Umum;DA U	ASN	40 Orang	8.608.238.000



Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja 2025			Pagu			Lokasi	Sumber Dana	Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju 2026		
							APBD 2025	Renja 2025	Renja Perubahan 2025	APBD 2025	Renja 2025	Renja Perubahan 2025				Kinerja	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	1	8	1	2,05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	81 perse n	81 perse n	81 perse n	38.600.000	38.600.000	-				10 pers 0 en	65.000.000	
2	1	8	1	2,05	11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	7 Orang	7 Orang	0 Orang	38.600.000	38.600.000	-	Luar Daerah dan Kab. Baltim	Dana Transfer Umum;DA U	ASN dan pegawai DPMPTSP	0 Oran g	65.000.000
2	1	8	1	2,06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemeruhan sarana pendukung kinerja perangkat daerah	87,50 perse n	87,50 perse n	87,50 perse n	537.424.100	537.502.100	341.215.000				90 pers en	967.500.000
2	1	8	1	2,06	1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	4 paket	15.338.800	15.338.800	15.338.800	OPD	Penerimaan Pembiayaan	ASN dan pegawai DPMPTSP	2 pake t	28.000.000
2	1	8	1	2,06	2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	99.975.100	99.999.900	75.453.700	OPD	Penerimaan Pembiayaan	ASN dan pegawai DPMPTSP	12 pake t	110.000.000
2	1	8	1	2,06	3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 paket	9 paket	9 paket	31.398.000	31.398.000	29.808.400	OPD	Penerimaan Pembiayaan	ASN dan pegawai DPMPTSP	9 pake t	47.000.000
2	1	8	1	2,06	4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	10 paket	10 paket	36.891.200	36.944.400	29.476.600	OPD	Penerimaan Pembiayaan	ASN dan pegawai DPMPTSP	10 pake t	35.000.000



Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja 2025			Pagu			Lokasi	Sumber Dana	Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju 2026		
							APBD 2025	Renja 2025	Renja Perubahan 2025	APBD 2025	Renja 2025	Renja Perubahan 2025				Kinerja	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	1	8	1	2,06	5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 paket	9 paket	9 paket	48.846.000	48.846.000	36.162.500	OPD	Penerimaan Pembiayaan	ASN dan pegawai DPMPTSP	9 paket	85.000.000
2	1	8	1	2,06	6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	-	-	-	OPD	Penerimaan Pembiayaan	ASN dan pegawai DPMPTSP	0 dokumen	7.500.000
2	1	8	1	2,06	8	Sub Kegiatan Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4.975.000	4.975.000	4.975.000	OPD	Penerimaan Pembiayaan	ASN dan pegawai DPMPTSP	4 laporan	5.000.000
2	1	8	1	2,06	9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 laporan	55 laporan	25 laporan	300.000.000	300.000.000	150.000.000	Luar Daerah	Penerimaan Pembiayaan	ASN dan pegawai DPMPTSP	30 laporan	650.000.000
2	1	8	1	2,07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah	65 persen	65 persen	65 persen	246.154.200	246.154.200	132.021.900				70 persen	190.000.000
2	1	8	1	2,07	10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	48 unit	48 unit	49 unit	246.154.200	246.154.200	132.021.900	OPD	Dana Transfer Umum; Dana Bagi Hasil	Pegawai dan Masyarakat yang menerima layanan	20 unit	190.000.000
2	1	8	1	2,08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang kantor	91 persen	91 persen	91 persen	790.290.000	521.017.200	819.260.000				95 persen	530.000.000
2	1	8	1	2,08	2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	216.020.000	216.020.000	176.420.000	OPD	Penerimaan Pembiayaan	ASN dan pegawai DPMPTSP	12 laporan	140.000.000



DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR

PERUBAHAN
RENCANA KERJA
2025

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja 2025			Pagu			Lokasi	Sumber Dana	Kelomp ok Seseran	Prakiraan Meju 2026	
							APBD 2025	Renja 2025	Renja Perubahan 2025	APBD 2025	Renja 2025	Renja Perubahan 2025				Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1	1	2,08	4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	574.270.000	304.997.200	642.840.000	OPD	Penerimaan Pembiayaan	ASN dan pegawai DPMPTSP	12 laporan	390.000.000
2	1	1	2,09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	95 persen	95 persen	95 persen	439.278.000	460.422.000	187.678.000				97 persen	625.000.000
2	1	1	2,09	2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit	11 unit	11 unit	141.290.000	162.310.000	112.410.000	Kab. Belitim	Dana Transfer Umum;DA U	Pegawai dan Masyarakat yang menerim a layanan	11 unit	355.000.000
2	1	1	2,09	9	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	1 unit	274.808.000	274.932.000	52.088.000	Kab. Belitim	Dana Transfer Umum;DA U ; DIF	Pegawai dan Masyarakat yang menerim a layanan	2 unit	235.000.000
2	1	1	2,09	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	34 unit	34 unit	35 unit	23.180.000	23.180.000	23.180.000	Kab. Belitim	Dana Transfer Umum;DA U	Pegawai dan Masyarakat yang menerim a layanan	36 unit	35.000.000
					PENANAMAN MODAL					440.559.500	1.457.845.000	144.797.700					1.565.344.000
2	1	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKUM PENANAMAN MODAL	Cakupan kebijakan daerah terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan	100 persen	100 persen	100 persen	72.538.000	97.077.000	19.841.000				100 persen	50.000.000



Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja 2025			Pagu			Lokasi	Sumber Dana	Kelomp ok Seseran	Prakiraan Meju 2026	
							APBD 2025	Renja 2025	Renja Perubahan 2025	APBD 2025	Renja 2025	Renja Perubahan 2025				Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	1	2	2,01		Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan daerah tentang kemudahan berusaha dibidang penanaman modal yang telah disusun berdasarkan ketentuan	1 keblia kan	1 keblia kan	1 keblia kan	18.797.000	32.379.000	7.225.000				1 keblia kan	-
2	1	2	2,01	3	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	10 doku men	10 doku men	2 doku men	18.797.000	32.379.000	7.225.000				3 Doku men	-
2	1	2	2,02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase informasi investasi yang tersedia	10 0 perse n	100 perse n	100 perse n	53.741.000	64.698.000	12.616.000				10 0 pers en	50.000.000
2	1	2	2,02	2	Pemutakhiran data Potensi Investasi Daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah Daerah yang telah Dilaksanakan Pemutakhiran data Potensi Investasi	1 Daera h	1 Daera h	1 Daera h	53.741.000	64.698.000	12.616.000	Kab. Belitim	Pendapata n Tranfer antar Daerah	Pelaku usaha/ Investor/ pananam modal	1 Daer ah	50.000.000
2	1	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Investor baru yang berinvestasi	54 Invest or	54 Inves tor	55 Invest or	189.149.500	189.398.700	41.125.000				55 Inve stor	500.000.000
2	1	3	2,01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan sektor usaha yang dipromosikan	4 sektor	4 sekt or	4 sektor	189.149.500	189.398.700	41.125.000				4 sekt or	500.000.000
2	1	3	2,01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 doku men	1 doku men	1 doku men	189.149.500	189.398.700	41.125.000	Kab. Belitim	Dana Transfer Umum;DA U ; DIF	Pelaku usaha/ Investor/ pananam modal	1 doku men	500.000.000



DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR

PERUBAHAN
RENCANA KERJA
2025

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja 2025			Pagu			Lokasi	Sumber Dana	Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju 2026						
							APBD 2025		Renja 2025		Renja Perubahan 2025					APBD 2025		Renja 2025		Renja Perubahan 2025		Kinerja
1					2	3	4		5		6		7	8	9	10	11	12	13	14		
2	1	8	4		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu	94,70	persen	94,70	persen	94,70	persen	48.279.100	468.939.600	44.852.700				97	persen	371.913.000	
2	1	8	4	2,01	1	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan	11	persen	11	persen	11	persen	48.279.100	468.939.600	44.852.700				7	persen	371.913.000
2	1	8	4	2,01	6	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000	pelaku usaha	1000	pelaku usaha	1000	pelaku usaha	30.041.600	438.309.600	26.615.200	Kab. Belitum	Pendapatan Transfer antar Daerah	Masyarakat, pelaku usaha dan pegawai PTSP	1000	pelaku usaha	351.913.000
2	1	8	4	2,01	8	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	60	Kegiatan Usaha	60	Kegiatan Usaha	60	Kegiatan Usaha	18.237.500	30.630.000	18.237.500		Pendapatan Transfer antar Daerah		40	kegiatan usaha	20.000.000
2	1	8	5		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya	62	investor	62	investor	62	investor	119.247.800	686.483.100	38.979.000				51	investor	583.431.000	



Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja 2025			Pagu			Lokasi	Sumber Dana	Kelomp ok Seseran	Prakiraan Meju 2026	
							APBD 2025	Renja 2025	Renja Perubahan 2025	APBD 2025	Renja 2025	Renja Perubahan 2025				Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1	5	2,01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepatuhan investor terhadap kewajiban penyampaian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	8.5 persen	8.5 persen	8.5 persen	119.247.800	686.483.100	38.979.000				9 pers en	583.431.000
2	1	5	2,01	4	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	12 kegiatan usaha	12 kegiatan usaha	30 kegiatan usaha	24.637.200	97.618.000	7.104.000	Kab. Belitim	DAK NF Fasilitas PM; Dana Transfer Umum DAU	masyarak at, pelaku usaha, penanam modal/ Investor	30 kegiatan usah a	140.000.000
2	1	5	2,01	5	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementgasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	300 pelaku usaha	300 pelaku usaha	0 pelaku usaha	52.310.600	403.624.100	-	Kab. Belitim	DAK NF Fasilitas PM; Dana Transfer Umum DAU	masyarak at, pelaku usaha, penanam modal/ Investor	300 pelaku usah a	218.431.000
2	1	5	2,01	6	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisis dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan, serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	75 kegiatan usaha	75 kegiatan usaha	30 kegiatan usaha	42.300.000	185.241.000	31.875.000	Kab. Belitim	DAK NF Fasilitas PM	masyarak at, pelaku usaha, penanam modal/ Investor	30 kegiatan usah a	225.000.000



**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR**

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA
2025**

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja 2025			Pagu			Lokasi	Sumber Dana	Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju 2026						
							APBD 2025	Renja 2025	Renja Perubahan 2025	APBD 2025	Renja 2025	Renja Perubahan 2025				Kinerja	Pagu Indikatif					
1					2	3	4		5		6		7	8	9	10	11	12	13	14		
2	1	8	6		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal dikelola berdasarkan sektor usaha	81, 82	perse n	81,82	perse n	81,82	perse n	11.345.100	15.946.600	-				10 0	pers en	60.000.000	
2	1	8	6	2,01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan	91	perse n	91	perse n	91	perse n	11.345.100	15.946.600	-				10 0	pers en	60.000.000	
2	1	8	6	2,01	2	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12	doku men	12	doku men	0	doku men	11.345.100	15.946.600	-	Kab. Baltim	Pendapata n Transfer antar Daerah	masyarak at, pelaku usaha, penanam modal/ Investor	12	doku men	60.000.000
JUMLAH													6.799.859.552	8.164.220.000	5.839.475.750						12.576.082.000	



BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 ini mengacu pada hasil evaluasi Rencana Kerja Tahun 2025 sampai bulan Maret 2025 atau Triwulan I. Perubahan Renja ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Kerja Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah termasuk Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Belitung Timur tahun 2025 dan bersifat indikatif.

Demikian, diharapkan dokumen ini dapat berfungsi sebagai acuan bagi seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dokumen ini juga merupakan dokumen transisi antara Rencana Strategis DPMPTSP periode 2021–2026 dan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur periode 2025–2029 untuk Tahun Anggaran 2025. Selain itu, dokumen ini menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, serta digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan perubahan program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025.

Manggar, 24 Juni 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitung Timur



HARLI AGUSTA, ST
NIP 19750821 200212 1 005

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. BELITUNG TIMUR TAHUN 2025																					
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU								8.164.220.000,00	6.799.859.552,00	5.839.475.750,00	-2.324.744.250,00							13.147.082.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.164.220.000,00	6.799.859.552,00	5.839.475.750,00	-2.324.744.250,00							13.147.082.000,00		
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							8.164.220.000,00	6.799.859.552,00	5.839.475.750,00	-2.324.744.250,00							13.147.082.000,00		
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan				79 Persen	79 Persen	6.706.375.000,00	6.359.300.052,00	5.694.678.050,00	4.875.363.000,00							11.581.738.000,00		
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar				100 Persen	100 Persen	6.500.600,00	6.500.600,00	0,00	-6.500.600,00			-	-	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	0 Dokumen	6.500.600,00	6.500.600,00	0,00	-6.500.600,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGLUARAN PEMBIAYAAN	-	-			25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar				100 Persen	100 Persen	4.896.178.900,00	4.301.053.152,00	4.214.503.150,00	-681.675.750,00			-	-	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		8.608.238.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/b ulan	42 Orang/b ulan	4.896.178.900,00	4.301.053.152,00	4.214.503.150,00	-681.675.750,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.608.238.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik				81 Persen	81 Persen	38.600.000,00	38.600.000,00	0,00	-38.600.000,00			-	-	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		181.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	-	-	-			76.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				7 Orang	0 Orang	38.600.000,00	38.600.000,00	0,00	-38.600.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGLUARAN PEMBIAYAAN	-	-			65.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah				87,50 Persen	87,50 Persen	537.502.100,00	537.424.100,00	341.215.000,00	-196.287.100,00			-	-	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		967.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	15.338.800,00	15.338.800,00	15.338.800,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGLUARAN PEMBIAYAAN	-	-			28.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	99.999.900,00	99.975.100,00	75.453.700,00	-24.546.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGLUARAN PEMBIAYAAN	-	-			110.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	31.398.000,00	31.398.000,00	29.808.400,00	-1.589.600,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGLUARAN PEMBIAYAAN	-	-			47.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	36.944.400,00	36.891.200,00	29.476.600,00	-7.467.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	48.846.000,00	48.846.000,00	36.162.500,00	-12.683.500,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			85.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	-	-	- -			7.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	4.975.000,00	4.975.000,00	4.975.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55 Laporan	25 Laporan	0,00	300.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			650.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2		NON URUSAN							8.164.220.000,00	6.799.859.552,00	5.839.475.750,00	-2.324.744.250,00							13.147.082.000,00		
2.18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.164.220.000,00	6.799.859.552,00	5.839.475.750,00	-2.324.744.250,00							13.147.082.000,00		
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.164.220.000,00	6.799.859.552,00	5.839.475.750,00	-2.324.744.250,00							13.147.082.000,00		
2.18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							8.164.220.000,00	6.799.859.552,00	5.839.475.750,00	-2.324.744.250,00							13.147.082.000,00		
2.18.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah				65 Persen	65 Persen	246.154.200,00	246.154.200,00	132.021.900,00	-114.132.300,00			-	- -		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		390.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				48 Unit	49 Unit	246.154.200,00	246.154.200,00	132.021.900,00	-114.132.300,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			190.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor				91 Persen	91 Persen	521.017.200,00	790.290.000,00	819.260.000,00	298.242.800,00			-	- -		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		785.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			255.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2		NON URUSAN							8.164.220.000,00	6.799.859.552,00	5.839.475.750,00	-2.324.744.250,00							13.147.082.000,00		
2.18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.164.220.000,00	6.799.859.552,00	5.839.475.750,00	-2.324.744.250,00							13.147.082.000,00		
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.164.220.000,00	6.799.859.552,00	5.839.475.750,00	-2.324.744.250,00							13.147.082.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							8.164.220.000,00	6.799.859.552,00	5.839.475.750,00	-2.324.744.250,00							13.147.082.000,00	
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	216.020.000,00	216.020.000,00	176.420.000,00	-39.600.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			140.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	304.997.200,00	574.270.000,00	642.840.000,00	337.842.800,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			390.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik				95 Persen	95 Persen	460.422.000,00	439.278.000,00	187.678.000,00	-272.744.000,00			-	- -	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		625.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	162.310.000,00	141.290.000,00	112.410.000,00	-49.900.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			355.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	1 Unit	274.932.000,00	274.808.000,00	52.088.000,00	-222.844.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			235.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				34 Unit	35 Unit	23.180.000,00	23.180.000,00	23.180.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan kebijakan daerah terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan				100 Persen	100 Persen	97.077.000,00	72.538.000,00	19.841.000,00	-47.077.000,00							50.000.000,00	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan daerah tentang kemudahan berusaha dibidang penanaman modal yang telah disusun berdasarkan ketentuan				1 kebijakan	1 kebijakan	32.379.000,00	18.797.000,00	7.225.000,00	-25.154.000,00			-	- -	Meningkatkan investor yang berinvestasi		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				10 Dokumen	2 Dokumen	32.379.000,00	18.797.000,00	7.225.000,00	-25.154.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase informasi investasi yang tersedia				100 Persen	100 Persen	64.698.000,00	53.741.000,00	12.616.000,00	-52.082.000,00			-	- -	Meningkatkan investor yang berinvestasi		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)																		
			Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi				1 Daerah	1 Daerah	64.698.000,00	53.741.000,00	12.616.000,00	-52.082.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Investor baru yang berinvestasi				54 Investor	55 Investor	189.398.700,00	189.149.500,00	41.125.000,00	310.601.300,00							500.000.000,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan sektor usaha yang dipromosikan				4 sektor	4 sektor	189.398.700,00	189.149.500,00	41.125.000,00	-148.273.700,00			-	- -	Meningkatkan investor yang berinvestasi		500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	189.398.700,00	189.149.500,00	41.125.000,00	-148.273.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu				94,70 Persen	94,70 Persen	468.939.600,00	48.279.100,00	44.852.700,00	-97.026.600,00							371.913.000,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan				11 Persen	11 Persen	468.939.600,00	48.279.100,00	44.852.700,00	-424.086.900,00			-	- -	Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah		371.913.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				1000 Pelaku Usaha	1000 Pelaku Usaha	438.309.600,00	30.041.600,00	26.615.200,00	-411.694.400,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			351.913.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				60 Kegiatan Usaha	60 Kegiatan Usaha	30.630.000,00	18.237.500,00	18.237.500,00	-12.392.500,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya				62 investor	62 investor	686.483.100,00	119.247.800,00	38.979.000,00	-103.052.100,00							583.431.000,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepatuhan investor terhadap kewajiban penyampaian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)				8,5 Persen	8,5 Persen	686.483.100,00	119.247.800,00	38.979.000,00	-647.504.100,00			-	-	Meningkatkan investor yang berinvestasi		583.431.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya				12 Kegiatan Usaha.	30 Kegiatan Usaha.	97.618.000,00	24.637.200,00	7.104.000,00	-90.514.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			140.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				300 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	403.624.100,00	52.310.600,00	0,00	-403.624.100,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			218.431.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				75 Kegiatan Usaha	30 Kegiatan Usaha	185.241.000,00	42.300.000,00	31.875.000,00	-153.366.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			225.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal dikelola berdasarkan sektor usaha				81,82 Persen	81,82 Persen	15.946.600,00	11.345.100,00	0,00	44.053.400,00							60.000.000,00	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan				91 Persen	91 Persen	15.946.600,00	11.345.100,00	0,00	-15.946.600,00			-	-	Meningkatkan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi		60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				12 Dokumen	0 Dokumen	15.946.600,00	11.345.100,00	0,00	-15.946.600,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		J U M L A H							8.164.220.000,00	6.799.859.552,00	5.839.475.750,00	-2.324.744.250,00							13.147.082.000,00	



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-350 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu diubah Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025;
- b. bahwa perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2049 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur 137);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 15);
14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 17);
15. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025.

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025, dengan Perangkat Daerah terverifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 24 Juni 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PADA PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

No.	Nama Perangkat Daerah	Hasil Verifikasi
1.	Sekretariat Daerah	Sesuai
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sesuai
3.	Inspektorat Daerah	Sesuai
4.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sesuai
5.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Sesuai
6.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sesuai
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sesuai
8.	Dinas Pendidikan	Sesuai
9.	Dinas Kesehatan	Sesuai
10.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sesuai
11.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sesuai
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sesuai
13.	Dinas Perhubungan	Sesuai
14.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Sesuai
15.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sesuai
16.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sesuai
17.	Dinas Pertanian dan Pangan	Sesuai
18.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sesuai
19.	Dinas Perikanan	Sesuai
20.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Sesuai
21.	Dinas Lingkungan Hidup	Sesuai
22.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Sesuai
23.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Sesuai
24.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sesuai
25.	Satuan Polisi Pamong Praja	Sesuai
26.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sesuai
27.	Kecamatan Manggar	Sesuai
28.	Kecamatan Gantung	Sesuai
29.	Kecamatan Kelapa Kampit	Sesuai
30.	Kecamatan Dendang	Sesuai
31.	Kecamatan Damar	Sesuai
32.	Kecamatan Simpang Renggang	Sesuai
33.	Kecamatan Simpang Pesak	Sesuai

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03- 238 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025;
- b. bahwa pembentukan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2049 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klafikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
15. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 15)

17. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 15)
18. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025.
- KESATU :** Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut :
- a. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan Sistem Informasi Perencana Daerah;
 - b. penyusunan agenda kerja tim penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. menyusun rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - d. menyempurnakan rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Bupati;
 - e. menyampaikan rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah untuk diverifikasi;
 - f. merumuskan rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan menyampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- KETIGA :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Maret 2025.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 29 April 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN

**TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025**

**I. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026**

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah	Ketua
2	Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan	Sekretaris
3	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Anggota
Kelompok Kerja I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		
1	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua Pokja I
2	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama	Anggota
3	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota
4	Kepala Bagian Hukum	Anggota
5	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama	Anggota
6	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Hukum	Anggota
7	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota
8	Analisis Kerjasama Lembaga Keagamaan Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota
Kelompok Kerja II Perekonomian dan Pembangunan		
1	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ketua Pokja II
2	Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Anggota
3	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
4	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan	Anggota
5	Analisis Kebijakan Ahli Pertama Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
6	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Anggota
Kelompok Kerja III Administrasi Umum		
1	Asisten Administrasi Umum	Ketua Pokja III
2	Kepala Bagian Umum	Anggota
3	Kepala Bagian Organisasi	Anggota
4	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota
5	Kepala Sub Bagian Protokol	Anggota
6	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi	Anggota
7	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda Bagian Umum	Anggota
8	Pengelola Data Bagian Umum	Anggota

II. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris DPRD	Ketua
2.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Sekretaris
Kelompok Kerja I Perencanaan Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian		
1.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Ketua Pokja I
2.	Pranata Komputer	Anggota
Kelompok Kerja II Perencanaan Kegiatan DPRD Tentang Persidangan dan Kajian Perundang-Undangan		
1.	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	Ketua Pokja II
2.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan	Anggota
3.	Pranata Komputer	Anggota
Kelompok Kerja III Perencanaan Fasilitas DPRD Tentang Penganggaran dan Pengawasan Pembangunan		
1.	Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Ketua Pokja III
2.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota

III. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Inspektur Daerah	Ketua
2	Sekretaris Inspektorat Daerah	Sekretaris
3	Kasubbag Administrasi Umum & Keuangan	Anggota
4	Pengelola Evaluasi TL LHP	Anggota
5	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah Madya Ahli Madya	Anggota
6	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah Madya Ahli Madya	Anggota
Kelompok Kerja I Inspektur Pembantu Pemerintahan		
1	Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan	Ketua Pokja I
2	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah Ahli Madya	anggota
3	Auditor Ahli Muda	anggota
4	Auditor Ahli Muda	anggota
Kelompok Kerja II Inspektur Pembantu Perekonomian Pembangunan		
1	Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian Pembangunan	Ketua Pokja II
2	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah Ahli Madya	Anggota

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
3	Auditor Ahli Muda	Anggota
4	Auditor Ahli Pertama	Anggota
5	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah Ahli Pertama	Anggota
Kelompok Kerja III Bidang Kesejahteraan Sosial		
1	Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial	Ketua Pokja III
2	Auditor Ahli Muda	Anggota
3	Auditor Penyelia	Anggota
4	Auditor Ahli Pertama	Anggota
5	Auditor Terampil	Anggota
Kelompok Kerja IV Bidang Investigasi		
1	Inspektur Pembantu Bidang Investigasi	Ketua Pokja IV
2	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah Ahli Madya	Anggota
3	Auditor Ahli Pertama	Anggota
4	Auditor Penyelia	Anggota
5	Auditor Ahli Pertama	Anggota

IV. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Badan	Ketua
2	Sekretaris Badan	Sekretaris
3	Perencana Ahli Muda	Anggota
Kelompok Kerja I Bidang Anggaran		
1	Kepala Bidang Anggaran	Ketua Pokja I
2	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran	Anggota
3	Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran	Anggota
Kelompok Kerja II Data dan Informasi Pajak		
1	Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak	Ketua Pokja II
2	Kepala Sub Bidang Eksternifikasi Pajak	Anggota
3	Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pajak	Anggota
Kelompok Kerja III Bidang penetapan dan penagihan pajak		
1	Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak	Ketua Pokja III
2	Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak	Anggota
3	Kepala Sub Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Pelaporan	Anggota

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
Kelompok Kerja IV Bidang Perbendaharaan		
1	Kepala Bidang Perbendaharaan	Ketua Pokja IV
2	Kepala Sub Bidang Belanja Langsung	Anggota
3	Kepala Sub Bidang Administrasi Perbendaharaan	Anggota
Kelompok Kerja V Bidang Akuntansi dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah		
1	Kepala Bidang Akuntansi dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Ketua Pokja V
2	Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Anggota
3	Kepala Sub Bidang Pertanggungjawaban dan Informasi Keuangan Daerah	Anggota
Kelompok Kerja VI Bidang Kekayaan Daerah		
1	Kepala Bidang Kekayaan Daerah	Ketua Pokja VI
2	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan pemanfaatan	Anggota
3	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Penatausahaan	Anggota

V. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan	Ketua
2.	Sekretaris Badan	Sekretaris
3.	Perencana Ahli Muda	Anggota
4.	Perencana Ahli Pertama	Anggota
Kelompok Kerja I Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		
1.	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Ketua Pokja I
2.	Perencana Ahli Muda	Anggota
3.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
4.	Perencana Ahli Pertama	Anggota
Kelompok Kerja II Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah		
1.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua Pokja II
2.	Perencana Ahli Muda	Anggota
3.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
4.	Perekayasa Ahli Muda	Anggota
5.	Perencana Ahli Pertama	Anggota
6.	Perekayasa Ahli Pertama	Anggota

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
Kelompok Kerja III Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
1.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Ketua Pokja III
2.	Perencana Ahli Muda	Anggota
3.	Perencana Ahli Pertama	Anggota
Kelompok Kerja IV Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan kewilayahan		
1.	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber daya alam, Infrastruktur dan kewilayahan	Ketua Pokja IV
2.	Perencana Ahli Muda	Anggota
3.	Perencana Ahli Pertama	Anggota

VI. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan	Ketua
2.	Sekretaris Badan	Sekretaris
3.	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
4.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
Kelompok Kerja I Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian		
1.	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Ketua Pokja I
2.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Anggota
Kelompok Kerja II Bidang Penilaian Kinerja, Mutasi, Promosi dan Penghargaan		
1.	Kepala Bidang Penilaian Kinerja, Mutasi, Promosi dan Penghargaan	Ketua Pokja II
2.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Anggota

VII. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Perencana Ahli Muda	Anggota
4.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota
5.	Kasubag Umum & Kepegawaian	Anggota

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
Kelompok Kerja I Bidang Pembinaan Anak Usia Dini dan Pembinaan Masyarakat		
1.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD & Pendidikan Masyarakat	Ketua Pokja I
2.	Kepala Seksi PAUD	anggota
3.	Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat & Kursus	anggota
4.	Analisis Kebijakan Pertama	anggota
Kelompok Kerja II Bidang Pembinaan Sekolah Dasar		
1.	Kepala Bidang Pembinaan SD	Ketua Pokja II
2.	Kepala Seksi Kurikulum	Anggota
3.	Kepala Seksi Program, Data, dan Sarana Prasarana	Anggota
4.	Analisis Kebijakan Muda	Anggota
Kelompok Kerja III Bidang Sekolah Menengah Pertama		
1.	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Ketua Pokja III
2.	Kepala Seksi Kurikulum	Anggota
3.	Kepala Seksi Kesiswaan & Peningkatan Mutu	Anggota
4.	Analisis Kebijakan Pertama	Anggota
Kelompok Kerja IV Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
1.	Kepala Bidang Pembinaan PTK	Ketua Pokja IV
2.	Kepala Seksi PTK PAUD	Anggota
3.	Kepala Seksi PTK SD	Anggota
4.	Analisis Kebijakan Pertama	Anggota

VIII. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3	Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian	Anggota
4	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
5	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
Kelompok Kerja I Bidang Kesehatan Masyarakat		
1	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Ketua Pokja I
2	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	anggota
3	Administrator Kesehatan Ahli Muda	anggota
4	Analisis Kebijakan Pertama	anggota
Kelompok Kerja II Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan		
1	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Ketua Pokja II

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
2	Kasubag Perencanaan	Anggota
3	Analisis Perencana	Anggota
4	Analisis Pembayaran Jaminan Kesehatan	Anggota
5	Administrator Kesehatan	Anggota
6	Analisis Obat dan Makanan	Anggota
7	Analisis Kebijakan Muda	Anggota
Kelompok Kerja III Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		
1	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Ketua Pokja III
2	Epidemiologi Kesehatan Ahli Muda	Anggota
3	Epidemiologi Kesehatan Ahli Muda	Anggota
4	Epidemiologi Kesehatan Ahli Muda	Anggota
5	Sanitarian Ahli Muda	Anggota

IX. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Perencana Ahli Muda	Anggota
4.	Kasubbag Keuangan	Anggota
5.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
Kelompok Kerja I Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan		
1.	Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	Ketua
2.	Pengawas Lingkungan Ahli Muda	Anggota
3.	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda	Anggota
4.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	Anggota
5.	Pengelola Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup	Anggota
6.	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama	Anggota
Kelompok Kerja II Bidang Persampahan		
1.	Kepala Bidang Persampahan	Ketua
2.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Anggota
3.	Analisis Lingkungan Hidup	Anggota
Kelompok Kerja III Bidang Tata Lingkungan		
1.	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Ketua
2.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Anggota
3.	Analisis Lingkungan Hidup	Anggota

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
Kelompok Kerja IV Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		
1.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Ketua
2.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Anggota
3.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	Anggota
4.	Kepala UPT Laboratorium Lingkungan	Anggota
5.	Pengelolaan Penyehatan Lingkungan	Anggota

X. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026

NO	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3	Kasubag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
4	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
5	Perencana Ahli Muda	Anggota
Kelompok Kerja I Bidang Bina Marga		
6	Kepala Bidang Bina Marga	Ketua Pokja I
7	JFT Teknik Jalan dan Jembatan	Anggota
Kelompok Kerja II Bidang Sumber Daya Air		
8	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Ketua Pokja II
9	JFT Teknik Pengairan Ahli Muda	Anggota
Kelompok Kerja III Bidang Cipta Karya		
10	Kepala Bidang Cipta Karya	Ketua Pokja III
11	JFT Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	Anggota
Kelompok Kerja IV Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan		
12	Kepala Bidang Penataan Ruang	Ketua Pokja IV
13	Kasie Pertanahan	Anggota
Kelompok Kerja V Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman		
14	Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman	Ketua Pokja V
15	JFT Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	Anggota
Kelompok Kerja VI Bidang Bina Kontruksi		
16	Kepala Bidang Bina Kontruksi	Ketua Pokja VI
17	Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan	Anggota

XI. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas	Ketua Tim
2	Sekretaris Dinas	Sekretaris Tim
3	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya	Anggota
4	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
5	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Anggota
6	Bendahara	Anggota
7	Pengadministrasi Kepegawaian	Anggota
Kelompok Kerja I Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan, Penataan dan Kerja Sama Antar Desa		
1	Kepala Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan, Penataan dan Kerja Sama Antar Desa	Ketua Pokja I
2	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Anggota
3	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	Anggota
Kelompok Kerja II Bidang Pengelolaan Administrasi Desa		
1	Kepala Bidang Pengelolaan Administrasi Desa	Ketua Pokja II
2	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
3	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	Anggota
4	Penyusun Rencana Peningkatan Peran Serta Masyarakat	Anggota
Kelompok Kerja III Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi Penggerakan dan Informasi		
1	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi Penggerakan dan Informasi	Ketua Pokja III
2	Pengelola Advokasi Konseling dan Pembinaan KB dan Kesehatan Reproduksi	Anggota
Kelompok Kerja IV Bidang Keluarga Berencana, Kesejahteraan dan Pemberdayaan Keluarga		
1	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Kesejahteraan dan Pemberdayaan Keluarga	Ketua Pokja IV
2	Pemeriksa Pelayanan Keluarga Berencana	Anggota
3	Penyusun Bahan Ketahanan Keluarga	Anggota
4	Pengadministrasi Alat dan Obat Kontrasepsi	Anggota

XII. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas	Ketua Tim
2	Sekretaris Dinas	Sekretaris Tim
3	Perencana Ahli Pertama	Anggota
4	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Anggota
5	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
Kelompok Kerja I Bidang Aplikasi Informatika		
1	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	Ketua Pokja I
2	Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
3	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
Kelompok Kerja II Bidang Informasi dan Komunikasi Publik		
1	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Ketua Pokja II
2	Pranata Humas Ahli Muda	Anggota
3	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota
Kelompok Kerja III Bidang Keamanan Informasi, Persandian, dan Statistik		
1	Kepala Bidang Keamanan Informasi, Persandian, dan Statistik	Ketua Pokja III
2	Statistisi Ahli Muda	Anggota

XIII. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
4	Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
Kelompok Kerja I Bidang Lalu Lintas Jalan		
1	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan	Ketua Pokja I
2	Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Anggota
3	Kepala Seksi Perlengkapan Jalan	Anggota
4	Sub Koordinator Keselamatan dan Pengujian Bermotor	Anggota
Kelompok Kerja II Bidang Angkutan Jalan		
1	Kepala Bidang Angkutan Jalan	Ketua Pokja II
2	Kepala Seksi Angkutan Dalam Trayek dan Terminal	Anggota
3	Kepala Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Barang	Anggota

Kelompok Kerja III Bidang Pelayaran		
1	Kepala Bidang Pelayaran	Ketua Pokja III
2	Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Perairan	Anggota
3	Kepala Seksi Kepelabuhanan	Anggota

XIV. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
Kelompok Kerja I Bidang Sekretariat		
1.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Ketua Pokja I
2.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
3.	Perencana Ahli Pertama	Anggota
4.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	Anggota
Kelompok Kerja II Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan Wilayah Pesisir		
1.	Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan Wilayah Pesisir	Ketua Pokja II
2.	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda	Anggota
3.	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda	Anggota
4.	Analisis Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan	Anggota
5.	Analisis Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir	Anggota
Kelompok Kerja III Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		
1.	Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan Wilayah Pesisir	Ketua Pokja III
2.	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda	Anggota
3.	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda	Anggota
4.	Analisis Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan	Anggota
Kelompok Kerja IV Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		
1.	Kepala Bidang Pengolahan Usaha dan Diversifikasi Produk Perikanan	Ketua Pokja IV
2.	Kepala UPT Pengolahan Hasil Perikanan	Anggota
3.	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda	Anggota
4.	Analisis Mutu Hasil Perikanan	Anggota

XV. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
4	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Anggota
5	Perencana Ahli Muda	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
7	Pranata Komputer Pertama	Anggota
8	Pranata Komputer Terampil	Anggota
9	Pengelola Data dan Informasi	Anggota
10	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
Kelompok Kerja I Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
1	Penata Perizinan Ahli Madya	Ketua Pokja I
2	Penata Perizinan Ahli Muda	Anggota
Kelompok Kerja II Jabatan Fungsional Penanaman Modal		
1	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	Ketua Pokja II
2	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	Anggota

XVI. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3	Perencana Ahli Muda	Anggota
4	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
5	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
Kelompok Kerja I Bidang Perindustrian		
1	Kepala Bidang Perindustrian	Ketua Pokja I
2	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Mahir	Anggota
3	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama	Anggota
4	Pembina Industri Ahli Pertama	Anggota
Kelompok Kerja II Bidang Perdagangan		
1	Kepala Bidang Perdagangan	Ketua Pokja II
2	Pengawas kemetrollogian ahli muda	Anggota
3	Analisis Perdagangan ahli muda	Anggota
4	Penera ahli muda	Anggota
5	Penera mahir	Anggota
6	Kepala UPT Pengelola Pasar	Anggota

XVII. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026

No.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
4.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Anggota
5.	Perencana Ahli Muda	Anggota
Kelompok Kerja I : Bidang Kebudayaan		
1.	Kepala Bidang Kebudayaan	Ketua Pokja I
2.	Pamong Budaya Ahli Muda	Anggota
3.	Penelaah Teknis Kebijakan pada bidang Kebudayaan	Anggota
Kelompok Kerja II : Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata		
1.	Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata	Ketua Pokja II
2.	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata	Anggota
3.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata	Anggota
Kelompok Kerja III : Bidang Pemasaran Wisata, Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif		
1.	Kepala Bidang Pemasaran Wisata, Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	Ketua Pokja III
2.	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Bidang Pemasaran Wisata, Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
3.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Pemasaran Wisata, Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota

XVIII. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2026

No.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
4.	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Anggota
5.	Perencana Ahli Pertama	Anggota
6.	Pranata Komputer terampil	Anggota
Kelompok Kerja I Bidang Koperasi dan UKM		
1.	Kepala Bidang Koperasi dan UKM	Ketua Pokja I
2.	Pengawas Koperassi Ahli Muda	Anggota
3.	Penyuluh Koperasi	Anggota

No.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
Kelompok Kerja II Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja		
1.	Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Ketua Pokja II
2.	Pengantar Kerja Ahli Pertama	Anggota
3.	Instruktur Ahli Muda	Anggota
4.	Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama	Anggota
Kelompok Kerja III Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek		
1.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Ketua Pokja III
2.	Mediator HI Ahli Pertama	Anggota
3.	Pengantar Kerja Ahli Pertama	Anggota

XIX. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2026

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Perencana Ahli Muda	Anggota
4.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota
5.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
Kelompok Kerja I Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial		
1.	Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Ketua Pokja I
2.	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Anggota
3.	Pekerja Sosial Ahli Pertama	Anggota
Kelompok Kerja II Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin		
1.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial & Penanganan Fakir Miskin	Ketua Pokja II
2'	Penggerak Swadaya Masyarakat	Anggota
Kelompok Kerja III Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
1.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ketua Pokja III
Kelompok Kerja IV UPT Perlindungan Perempuan dan Anak		
1.	Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ketua Pokja IV

XX. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3	Perencana Ahli Muda	Anggota
4	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota
5	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
6	Kepala UPTD Perbenihan	Anggota
Kelompok Kerja I Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura		
1	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ketua Pokja I
2	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	Anggota
3	Analisis Pasar Hasil Pertanian	Anggota
4	Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman	Anggota
Kelompok Kerja II Bidang Perkebunan		
1	Kepala Bidang Perkebunan	Ketua Pokja II
2	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Anggota
3	Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman	Anggota
4	Analisis Pasar Hasil Pertanian	Anggota
Kelompok Kerja III Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan		
1	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ketua Pokja III
2	Medik Veteriner	Anggota
3	Paramedik Veteriner	Anggota
4	Pengawas Mutu Pakan	Anggota
5	Pengawas Bibit Ternak	Anggota
6	Pengawas Sanitasi Usaha Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Anggota
7	Pengelola Rumah Potong Hewan	Anggota
Kelompok Kerja IV Bidang Ketahanan Pangan		
1	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Ketua Pokja IV
2	Analisis Ketahanan Pangan	Anggota
3	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Anggota
Kelompok Kerja V Bidang Penyuluh Pertanian		
1	Kepala Bidang Penyuluh Pertanian	Ketua Pokja V
2	Penyuluh Pertanian Kabupaten	Anggota
3	Koordinator BPP Kecamatan	Anggota

XXI. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Ketua Tim
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Perencana Ahli Muda	Anggota
4.	Kasubbag Keuangan	Anggota
5.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
Kelompok Kerja I Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk		
1.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Ketua Pokja I
2.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
Kelompok Kerja II Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil		
1.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Ketua Pokja II
2.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
Kelompok Kerja III Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
1.	Pranata Komputer Ahli Muda	Ketua Pokja III
2.	Administrator Database Ahli Muda	Anggota
3.	Pengelola SIAK	
Kelompok Kerja IV Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan		
1.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Ketua Pokja IV
2.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota

XXII. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Anggota
4	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Anggota
5	Pengadministrasi Sarana Prasarana	Anggota
Kelompok Kerja I Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Kepramukaan		
1	Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Kepramukaan	Ketua Pokja I
2	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
3	Analisis Kepemudaan	Anggota
4	Penyuluh Kepemudaan	Anggota
Kelompok Kerja II Bidang Pengembangan Bakat Olahraga dan Prestasi		
1	Kepala Bidang Pengembangan Bakat Olahraga dan Prestasi	Ketua Pokja II
2	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
3	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
4	Pengelola Data Seksi Pembinaan Bakat Olahraga Pendidikan dan Prestasi	Anggota
5	Analisis Keolahragaan	Anggota
6	Penyuluh Olahraga	Anggota
7	Pengawas Olahraga	Anggota

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
Kelompok Kerja III Bidang Pembudayaan Olahraga dan Pengembangan Sarana dan Prasarana		
1	Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga dan Pengembangan Sarana dan Prasarana	Ketua Pokja III
2	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
3	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
4	Analisis Keolahragaan	Anggota

XXIII. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Sekretaris
Kelompok Kerja I Bidang Sekretariat		
1	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Ketua Pokja I
2	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota
3	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
4	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
Kelompok Kerja II Bidang Perpustakaan		
1	Kepala Bidang Perpustakaan	Ketua Pokja II
2	Pengelola Pustaka Elektronik	Anggota
3	Pengelola Bahan Pustaka	Anggota
4	Pustakawan Ahli Muda	Anggota
5	Pustakawan Ahli Pertama	Anggota
Kelompok Kerja III Bidang Kearsipan		
1	Kepala Bidang Kearsipan	Ketua Pokja III
2	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
3	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota

XXIV. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Satuan	Ketua
2	Sekretaris Satuan	Sekretaris
3	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
Kelompok Kerja I Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat		
1	Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat	Ketua Pokja I
2	Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Anggota
3	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat	Anggota

Kelompok Kerja II Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah		
1	Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah	Ketua Pokja II
2	Kepala Seksi Operasional Penegakan Produk Hukum Daerah	Anggota
3	Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan	Anggota
Kelompok Kerja III Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		
1	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Ketua
2	Kepala Seksi Pencegahan, Pemadaman dan Penyelamatan	Anggota
3	Kepala Sarana dan Prasarana	Anggota

XXV.TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026

No	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Badan	Ketua
2.	Sekretaris Badan	Sekretaris
3.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
4.	Perencana Ahli Pertama	Anggota
5.	Arsiparis Mahir	Anggota
Kelompok Kerja I Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama		
1.	Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama	Ketua Pokja I
2.	Analisis Wawasan Kebangsaan	Anggota
3.	Administrasi Umum	Anggota
Kelompok Kerja II Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan		
1.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Ketua Pokja II
2.	Administrasi Umum	Anggota
Kelompok Kerja III Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik		
1.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Ketua Pokja III
2.	Administrasi Umum	Anggota

XXVI. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Pelaksana	Ketua
2	Sekretaris Pelaksana	Sekretaris
3	Perencana ahli pertama	Anggota
4	Administrasi Kepegawaian	Anggota
5	Pranata Komputer	Anggota

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
Kelompok Kerja I Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan		
1	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Ketua Pokja I
2	Analisis Kebencanaan Pertama	Anggota
3	Penata Penanggulangan Bencana	Anggota
Kelompok Kerja II Seksi Kedaruratan dan Logistik		
1	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	Ketua Pokja II
2	Penata Penanggulangan Bencana Pertama	Anggota
3	Analisis Kebencanaan	Anggota
Kelompok Kerja III Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi		
1	Kepala Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Ketua Pokja III
2	Konselor	Anggota

XXVII. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN MANGGAR
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Camat	Ketua
2	Sekretaris	Sekretaris
3	Kasubbag Keuangan dan Perencanaans	Anggota
4	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
Kelompok Kerja I Seksi Pemerintahan		
1	Kepala Seksi Pemerintahan	Ketua Pokja I
2	Penata Layanan Operasional	Anggota
Kelompok Kerja II Seksi ketentraman dan Ketertiban Umum		
1	Kepala Seksi ketentraman dan Ketertiban Umum	Ketua Pokja II
2	Penata Layanan Operasional	Anggota
Kelompok Kerja III Seksi Kesejahteraan Sosial		
1	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Ketua Pokja III
2	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
Kelompok Kerja IV Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat		
1	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Ketua Pokja IV
2	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

XXVIII. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN GANTUNG
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat	Ketua
2.	Sekretaris	Sekretaris
3.	Kasubbag Keuangan dan Perencanaan	Anggota
4.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
Kelompok Kerja I Seksi Pemerintahan		
1.	Kepala Seksi Pemerintahan	Ketua Pokja I
2.	Penata Kelola Pemerintahan	Anggota
3.	Pengolah Data dan Informasi	Anggota

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
Kelompok Kerja II Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum		
1.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Ketua Pokja II
2.	Penata Layanan Operasional	Anggota
3.	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
Kelompok Kerja III Seksi Kesejahteraan Sosial		
1.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Ketua Pokja III
2.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
3.	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
Kelompok Kerja IV Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat		
1.	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Ketua Pokja IV
2.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
3.	Pengolah Data dan Informasi	Anggota

XXIX. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN KELAPA KAMPIT
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat	Ketua
2.	Sekretaris	Sekretaris
3.	Kasubbag Keuangan dan Perencanaan	Anggota
4.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
Kelompok Kerja I Seksi Pemerintahan		
1.	Kepala Seksi Pemerintahan	Ketua Pokja I
2.	Pengadministrasi Pemerintahan	Anggota
3.	Analisis Desa dan Kelurahan	Anggota
Kelompok Kerja II Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum		
1.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Ketua Pokja II
2.	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
Kelompok Kerja III Seksi Kesejahteraan Sosial		
1.	Kepala Kesejahteraan Sosial	Ketua Pokja III
2.	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
Kelompok Kerja IV Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat		
1.	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Ketua Pokja V
2.	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

XXX. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN DAMAR
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat	Ketua
2.	Sekretaris	Sekretaris
3.	Kasubbag Keuangan dan Perencanaan	Anggota
4.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
Kelompok Kerja I Seksi Pemerintahan		
1.	Kepala Seksi Pemerintahan	Ketua Pokja I
2.	Pengadministrasi Pertanahan	Anggota
Kelompok Kerja II Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum		
1.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Ketua Pokja II
2.	Pengolah Data Keamanan dan Ketertiban Umum	Anggota
Kelompok Kerja III Seksi Kesejahteraan Sosial		
1.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Ketua Pokja III
2.	Pengolah Data Kesejahteraan Sosial	Anggota
Kelompok Kerja IV Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat		
1.	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Ketua Pokja V
2.	Pengolah Data Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota

XXXI. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN SIMPANG
RENGGIANG KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat	Ketua
2.	Sekretaris	Sekretaris
3.	Kasubbag Keuangan dan Perencanaan	Anggota
4.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
Kelompok Kerja I Seksi Pemerintahan		
1.	Kepala Seksi Pemerintahan	Ketua Pokja I
2.	Analisis Desa dan Kelurahan	Anggota
3.	Pengelola Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Anggota
4.	Pengadministrasi Pemerintahan	Anggota
Kelompok Kerja II Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum		
1.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Ketua Pokja II
2.	Penyuluh Keamanan Masyarakat	Anggota
3.	Pengelola Data	Anggota
Kelompok Kerja III Seksi Kesejahteraan Sosial		
1.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Ketua Pokja III

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
2.	Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Masalah Sosial	Anggota
3.	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Anggota
Kelompok Kerja IV Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat		
1.	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Ketua Pokja IV
2.	Analisis Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
3.	Pengelola Data	Anggota

XXXII. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN SIMPANG PESAK KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat	Ketua
2.	Sekretaris	Sekretaris
3.	Kasubbag Keuangan dan Perencanaan	Anggota
4.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
Kelompok Kerja I Seksi Pemerintahan		
1.	Kepala Seksi Pemerintahan	Ketua Pokja I
2.	Pengadministrasian Pemerintahan	Anggota
Kelompok Kerja II Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum		
1.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Ketua Pokja II
2.	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
Kelompok Kerja III Seksi Kesejahteraan Sosial		
1.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Ketua Pokja III
2.	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
Kelompok Kerja IV Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat		
1.	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Ketua Pokja IV
2.	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota

XXXIII. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN DENDANG KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Camat	Ketua
2	Sekcam	Sekretaris
3	Kasubag Keuangan dan Perencanaan	Anggota
4	Pengadministrasian Keuangan	Anggota
5	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
6	Pengelola Pemanfaatan Aset Daerah	Anggota

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
Kelompok Kerja I Seksi Pemerintahan		
1	Kasi Pemerintahan	Ketua Pokja I
2	Pengadministrasi Pemerintahan	Anggota
Kelompok Kerja II Seksi Kesejahteraan Sosial		
1	Kasi Kessos	Ketua Pokja II
2	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
Kelompok Kerja III Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat		
1	Kasi Pembangunan dan PM	Ketua Pokja III
2	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum		
1	Kasi Ketibum	Ketua Pokja IV
2	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota



BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN